

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Rhena Maharani
Universitas Tadulako
E-mail: rhenam919@gmail.com

Adfiyani Fadjar
Universitas Tadulako
E-mail: adfiyanifadjar@gmail.com

Erwa Sastrawan
Universitas Tadulako
E-mail: erwansastrawanfeb@gmail.com

ABSTRACT

The local government has attempted to implement regional autonomy, which has carried out development for 5 years through Regional Original Revenue (PAD) funding. The purpose of this research is to analyze the potential growth rate, as well as forecast the resource's future earnings. This study uses secondary data for the 2017-2021 financial and regional asset management bodies in Central Sulawesi with descriptive analysis. This research technique uses contribution ratio analysis techniques, growth ratios and trend ratios. These results indicate that the contribution of PAD sources found that local taxes and other legitimate PAD are the largest contributors to PAD in Central Sulawesi while levies and business entities still contribute and the elasticity is small, while the growth rate of PAD sources will have a tendency. of fluctuating growth rates.

Keywords: Contribution, Growth, trend analysis

ABSTRAK

Pemerintah daerah telah berupaya menerapkan otonomi daerah, yaitu telah melaksanakan pembangunan selama 5 tahun melalui pendanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pertumbuhan potensial, serta meramalkan pendapatan sumber daya di masa depan. Penelitian ini menggunakan data sekunder tahun anggaran 2017-2021 badan pengelola keuangan dan aset daerah di Sulawesi Tengah dengan analisis deskriptif. Teknik penelitian ini menggunakan teknik analisis rasio kontribusi, rasio pertumbuhan dan rasio trend. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi sumber PAD ditemukan bahwa pajak daerah dan PAD lain yang sah merupakan penyumbang PAD terbesar di Sulawesi Tengah sedangkan retribusi dan badan usaha masih memberikan kontribusi dan elastisitasnya kecil, sedangkan tingkat pertumbuhan sumber PAD akan memiliki kecenderungan. dari tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi.

Kata Kunci: Kontribusi, Pertumbuhan, Analisis trend

PENDAHULUAN

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan daerah yang bersumber dari potensi dari daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan undang-undang tentang keuangan negara, kekuasaan atas pengelolaan kekayaan negara dipisahkan dilaksanakan oleh wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan yang dikuasai oleh Menteri Keuangan. Sedangkan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan yang dananya bersumber dari APBD, diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah. (I Gede Putu Aryadi, S.Sos. et al., 2019) Dana yang diperoleh Pemerintah daerah merupakan penerimaan yang dipergunakan untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran tersebut merupakan uraian pembiayaan yang dipergunakan penyelenggaraan pemerintahan dan keperluan pembangunan. (Mustaqiem, 2008)

Pemerintah daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peranan dari pemerintah pusat dalam hal menjalankan fungsi pemerintah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan yang luas untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri serta meminimalisir campur tangan pemerintah pusat. (D. Abdullah, 2016) Kebijakan pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah merupakan langkah strategis bangsa Indonesia dalam rangka memperkuat perekonomian daerah untuk menghadapi era globalisasi ekonomi. Reformasi anggaran, khususnya reformasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu perubahan dalam manajemen keuangan daerah yang merupakan konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 24 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pusat dan Pemerintah Daerah. (Moshinsky, 2008)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Berikut adalah data Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi tengah. (Nasir, 2019).

PAD merupakan unsur yang penting dalam pendapatan daerah. PAD merupakan salah satu komponen sumber penerimaan daerah selain penerimaan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Keseluruhannya merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintah di daerah. (Gede & Artini, 2017). Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang

potensi harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu unsur APBD adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Berwulo et al., 2017)

Terdapat lima penyebab rendahnya PAD yang pada akhirnya mengakibatkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat antara lain: perusahaan daerah atau badan usaha milik daerah kurang berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah dan sentralisasi perpajakan yang tinggi. Meskipun terdapat beragam jenis pajak daerah, namun hanya sedikit yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama. Terdapat kekhawatiran jika daerah memiliki sumber keuangan yang tinggi akan menyebabkan terjadinya disintegrasi dan separatisme. ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat apabila terus berlangsung akan menyebabkan meningkatnya beban anggaran pada pemerintah pusat.

Berdasarkan Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari sumber-sumber Provinsi Sulawesi Tengah. Semakin besar PAD maka menunjukkan bahwa daerah itu mampu melaksanakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. Dapat di lihat pada tabel di bawah ini. (Qolbia, 2017).

Tabel 1**Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017-2021**

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2017	958.212.001.717,54
2018	1.016.628.663.677,00
2019	1.090.854.785.057,78
2020	1.122.670.398.589,07
2021	1.494.246.273.498,51

Realisasi terbesar terjadi di tahun 2021 yang dapat mempengaruhi presentasi perubahan PAD yang dilakukan melakukan analisis PAD pada kontribusi, pertumbuhan dan trend. Menurut Warsito (2001:128), Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah (Di et al., 2015).

Menurut Yusuf, Sri Noviasusanti, (2014) Hasil analisis trend menunjukkan bahwa pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kota Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara untuk retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi. Hasil penelitian dari pengaruh sumber-sumber PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD secara simultan berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Secara parsial hanya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang berpengaruh negatif terhadap tingkat ketergantungan, sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap tingkat ketergantungan keuangan daerah. Hasil ini senada dengan penelitian Magdalena Rombang (2013) menunjukkan bahwa potensi pemungutan Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kontribusi pajak daerah di Provinsi Sulawesi Utara begitu besar terhadap pendapatan asli daerah selama lima tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021. (Nasir, 2019)

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang banyak menggunakan angka menggunakan rancangan yang berstruktur, formal, dan spesifik serta memiliki rancangan operasional yang mendetail. (P. M. Abdullah, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kontribusi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sumber-sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. (Pinzon, 2013) Subjek penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan objek penelitiannya adalah laporan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017–2021.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. (Hutagalung & Hutagalung, 2020). Sumber data yang di gunakan yaitu laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2017–2021 yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio kontribusi, rasio pertumbuhan, elastisitas dan analisis *trend*.(Change et al., 2021)

1. Rasio Kontribusi PAD

Kriteria rasio sumber-sumber PAD. Rasio ini mengukur kemampuan dan kontribusi dari sumber-sumber terhadap PAD. Kriteria Rasio sumber-sumber PAD, Halim (2002) adalah :

- a. Jika dipeoleh nilai 00,00% -10,00% dikatakan sangat kurang
- b. Jika diperoleh nilai 10,01% - 20,00% dikatakan kurang
- c. Jika diperoleh 20,01% - 30,00% dikatakan sedang
- d. Jika diperoleh nilai 30,01% - 40,00% dikatakan cukup
- e. Jika diperoleh nilai 40,01% - 50,00% dikatakan baik
- f. Jika diperoleh nilai >50% dikatakan sangat baik (Tolosang et al., 2018).

2. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar pertumbuhan sumber PAD. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing sumber PAD dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat perhatian Abdul Halim (2008). Laju pertumbuhan sumber PAD dapat dilihat dengan menggunakan rumus berikut :

$$G(t-1,t) = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

- G adalah tingkat pertumbuhan sumber-sumber PAD yang dinyatakan dalam persen
- X_t adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t
- X_{t-1} adalah sumber PAD (Pajak, retribusi, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah) pada tahun t (tahun sebelumnya). (Fathah, 2017).

3. Analisis trend

Analisis trend ini dapat dimanfaatkan untuk perencanaan masa mendatang. Menurut Nata Wirawan (2001) dalam Sukardana (2010), analisis ini digunakan untuk mengetahui Perkiraan penerimaan komponen potensial sumber-sumber PAD. Rasio *trend* Sumber-sumber Penerimaan PAD daerah menggunakan persamaan yaitu:

$$Y' = a + bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \qquad b = \frac{\sum xy}{n}$$

Keterangan

a = Konstanta b = Slope

x = interval waktu n = jumlah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi PAD adalah persentase penerimaan rata-rata sumber PAD terhadap rata-rata PAD.

Tabel 1
Kontribusi PAD Tahun Anggaran 2017-2021

Tahun	pajak	retribusi	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Lain-lain
2017	82,49%	0,93%	1,86%	14,65%
2018	82,18%	1,10%	1,66%	15,05%
2019	82,17%	1,16%	1,68%	14,99%
2020	81,48%	1,61%	1,95%	15,26%
2021	71,90%	1,28%	2,18%	24,64%
Rata – rata	80%	1 %	2%	17%
Keterangan	Sangat baik	Sangat Kurang kurang	Sangat Kurang	Kurang

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah yang dijelaskan sebagai berikut:

3.1. Kontribusi pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD memiliki kontribusi terbesar dibandingkan sumber PAD lainnya yaitu sebesar 80 %, dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2017 sebesar 82, 49 %. Tabel berikut kontribusi Pajak Daerah tersebut.

Tabel 2
Kontribusi Pajak Daerah

TAHUN	PAJAK DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI (%)
2017	790,439,057,679.00	958,212,001,717.54	82.49%
2018	835,456,979,571.00	1,016,628,663,677.00	82.18%
2019	896,321,261,948.00	1,090,854,785,057.78	82.17%
2020	914,780,331,698.60	1,122,670,398,589.07	81.48%
2021	1,074,422,295,409.10	1,494,246,273,498.51	71.90%

- Tabel di atas menggambarkan kontribusi terbesar Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2017 sebesar 82,49% dikarenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis dari nilai Pajak Daerah tertinggi di tahun 2017. Dan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 71,90% dikarenakan Pajak Rokok mengalami penurunan kontribusi dari tahun sebelumnya.

3.2. Kontribusi retribusi daerah tahun anggaran 2017-2021 justru mengalami trend yang menurun, pada tahun 2017 kontribusi retribusi daerah sebesar 0,93% namun menjadi 1,10 % pada tahun 2018. Rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD memiliki kontribusi sebesar 1% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2020 sebesar 1,61 %. Tabel berikut akan menunjukkan kontribusi Retribusi Daerah tersebut.

Tabel 3

Kontribusi Retribusi Daerah

TAHUN	RETRIBUSI DAERAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI (%)
2017	8,876,138,026.00	958,212,001,717.54	0.93%
2018	11,225,203,122.00	1,016,628,663,677.00	1.10%
2019	12,670,320,760.42	1,090,854,785,057.78	1.16%
2020	14,690,106,655.58	1,122,670,398,589.07	1.31%
2021	19,111,110,345.00	1,494,246,273,498.51	1.28%

- Tabel di atas menggambarkan kontribusi terbesar Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2020 sebesar 1,31% di karenakan Retribusi Layanan Kesehatan merupakan jenis dari Retribusi Daerah tertinggi di tahun 2020. Dan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,93% dikarenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Terminal tidak menghasilkan Kontribusi.

3.3. Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan tahun anggaran 2017-2021 juga berfluktuasi setiap tahunnya, namun pada tahun 2021 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 kontribusi sebesar 1,95% namun pada tahun 2018 turun menjadi 1,66%. Rata-rata kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan terhadap PAD memiliki kontribusi sebesar 2%. Tabel berikut akan menunjukkan sumber-sumber Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan.

Tabel 3

Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan

TAHUN	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN YANG DI PISAHKAN	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI (%)
2017	18,478,974,477.00	958,212,001,717.54	1.93%
2018	16,907,254,096.00	1,016,628,663,677.00	1.66%
2019	18,375,395,982.00	1,090,854,785,057.78	1.68%
2020	21,914,954,430.00	1,122,670,398,589.07	1.95%
2021	32,558,872,743.29	1,494,246,273,498.51	2.18%

- Tabel di atas menggambarkan kontribusi terbesar Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Di Pisahkan terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2021 sebesar 2,18% dikarenakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara merupakan jenis dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang di Pisahkan karena hanya terjadi kontribusi di tahun 2021 . Dan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 1,66%% dikarenakan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Negara.

3.4. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2017-2021 berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 17 % dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2021 sebesar 24,64%. Tabel berikut akan menunjukkan sumber-sumber Lain-lain PAD yang Sah.

Tabel 4

Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah

TAHUN	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	PENDAPATAN ASLI DAERAH	KONTRIBUSI (%)
2017	140,417,831,535.54	958,212,001,717.54	14.65%
2018	153,039,226,888.00	1,016,628,663,677.00	15.05%
2019	163,487,806,367.36	1,090,854,785,057.78	14.99%
2020	171,285,005,804.89	1,122,670,398,589.07	15.26%
2021	368,153,995,001.12	1,494,246,273,498.51	24.64%

- Tabel di atas menggambarkan kontribusi terbesar Lain-lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu pada tahun 2021 sebesar 24,64% di karenakan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak di Pisahkan merupakan jenis dari nilai Lain-lain PAD yang Sah tertinggi. Dan untuk kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 0,93% dikarenakan beberapa sumber-sumber Lain-lain PAD yang sah yang tidak selalu berkontribusi seperti Hasil Penjualan BMD yang tidak di pisahkan, Hasil. Penjualan Peralatan dan Mesin dan Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa.

Pertumbuhan PAD Provinsi Sulawesi tengah Tahun Anggaran 2017-2021 Indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan kontribusi PAD adalah dengan melihat laju pertumbuhan PAD dari tahun ke tahun. Hasil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Pertumbuhan PAD

TAHUN	PAD	PAD -1	PERTUMBUHAN
2017	958.212.001.717,54	939.092.069.082,01	2,04%
2018	1.016.628.663.677,00	958.212.001.717,54	6,10%
2019	1.090.854.785.057,78	1.016.628.663.677,00	7,30%
2020	1.122.670.398.589,07	1.090.854.785.057,78	2,92%
2021	1.494.246.273.498,51	1.122.670.398.589,07	33,10%

- Tabel diatas dapat diketahui bahwa pertumbuhan pada Pendapatan Asli Daerah tahun 2017-2021 berfluktuatif. Peningkatan laju tertinggi sebesar 33,10% pada tahun 2021 sedangkan pertumbuhan terendah sebesar 2,04% yaitu pada tahun 2017. Untuk pertumbuhan 2019 sebesar 7,30% kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 2,92% yang disebabkan oleh adanya pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat akibat pandemic covid-19. Dan pertumbuhan tertinggi di tahun 2021 di sebabkan New Normal Pandemi Covid-19 dan sosialisasi kepada masyarakat agar membayar pajak tepat waktu dan membayar retribusi daerah.

Analisis Trend Sumber – Sumber PAD Provinsi di Indonesia Tahun Anggaran 2017-2021 Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui prospek penerimaan pajak, retribusi asil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan dan Lain-lain PAD yang sah pada tahun- tahun yang akan datang. Adapun rumusnya:

$$Y' = a + bx$$

$$a = \frac{\sum y}{n} \qquad b = \frac{\sum xy}{n}$$

Keterangan

a = Konstanta

x = interval waktub

= Slope

n = jumlah data

Tabel 3

Estimasi/Peramalan PAD Tahun Anggaran 2022- 2024

Sumber PAD	Estimasi 2022	tahun Estimasi 2023	tahun Estimasi 2024
Pajak	Rp 189.970.314.176	Rp 190.286.574.165	Rp 191.657.034.176
Retribusi	Rp 17.081.396.755	Rp 18.278.301.675	Rp 19.648.761.675
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	Rp 60.916.282.595	Rp 61.232.542.595	Rp 62.603.002.595
Lain2 PAD yg Sah	Rp 1.28.380.886	Rp 1.444.640.886	Rp 2.815.100.886

Hasil estimasi sumber PAD tahun 2022 sampai 2024 semuanya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan terbesar dari pajak, dimana pada tahun 2024 diestimasikan mendapat perolehan sebesar Rp 191.657.034.176 yang kemudian diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dengan estimasi sebesar Rp2.815.100.886, retribusi sebesar Rp 19.648.761.675 dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebesar Rp 62.603.002.595. Besarnya proporsi pajak di dukung dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dimana dari sektor pajak dan retribusi semakin membaik dan meningkat karena kewenangan yang dimiliki semakin luas.

KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kontribusi sumber PAD Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2017- 2021 didominasi oleh penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikategorikan memiliki kontribusi yang baik. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah, retribusi dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan.
2. Pertumbuhan masing masing sumber PAD dari tahun 2017-2020 berfluktuatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah masing – masing.
3. Estimasi sumber PAD melalui analisis trend untuk tahun 2022-2024 menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan perolehan terbesar dari pajak, dimana pada tahun 2024 diestimasikan mendapat perolehan sebesar Rp 191.657.034.176 yang kemudian diikuti oleh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, D. (2016). Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 1(1), 83. <https://doi.org/10.35706/positum.v1i1.501>

Abdullah, P. M. (2015). Metodologi Penelitian Kuantitatif. In *Aswaja Pressindo*.

Berwulo, L. L. D., Masinambow, V. A. J., & Wauran, P. C. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Analysis Of Local Revenue (PAD). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 17(01), 22–33.

Change, G., Cimino, M., York, N., Alifah, U., Mayssara A. Abo Hassanin Supervised, A., Chinatown, Y., Staff, C., & Change, G. (2021). Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(2), 6.

Di, P. C.-, Kupang, K., & Tobe, W. C. (2015). Analisis Kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Kupang.

Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi Bisnis Dan Perbankan*, 8(1), 33–48. <http://www.ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/download/109/97>

Gede, L., & Artini, S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia email : tarastya@gmail.com Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Da. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 6(5), 2360–2387.

Hutagalung, M. A. K., & Hutagalung, M. A. K. (2020). Analisa pembiayaan gadai emas Di Pt. Bank Syari'Ah Mandiri Kcp Setia Budi. *Jurnal Al-Qasd*, 1, 117.

I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M., Agung Pramuja, S. A., & Dkk. (2019). Buku Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. *Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, 1–2.

Moshinsky, M. (2008). Ekonomi Kelembagaan Pangan. In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1).

Mustaqiem, H. (2008). *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah*.

Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>

Pinzon, (2014). (2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif untuk mengidentifikasi kontribusi sumber pendapatan asli daerah (PAD) Variabel yang terlibat dalam penelitian ini yaitu sumber–sumber pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari paj.

Qolbia, Si. (2017). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan Daerah Pasar Surya Surabaya *Sifaul Qolbia Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara , FISIP , Universitas Airlangga*. 5, 1–10.

Tolosang, K. D., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Bisnis, D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(03), 79–92.